



Badung Tambah Dana Hibah Rp 206 Juta

Penambahan dana hibah yang diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat masuk pada APBD Perubahan 2018.

MANGUPURA, NusaBali

Setelah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 662.432.271.060 pada APBD Induk 2018 yang diperuntukkan bagi kelompok/anggota masyarakat, pada APBD Perubahan 2018, Pemkab Badung menambah hibah kepada kelompok/anggota masyarakat senilai Rp 206.600.000.000.

Bantuan hibah ini sebagian besar diperuntukkan bagi

pembangunan atau renovasi pura, balai banjar, sanggar atau sekaa, bantuan untuk subak, bantuan untuk kelompok tani dan ternak, sesuai dengan usulan masyarakat. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Badung I Ketut Gede Suyasa, menyatakan sampai saat ini bantuan hibah sudah terealisasi kepada 897 penerima. Sebelumnya pada APBD induk, belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat berjumlah 1.712 penerima hibah yang digelontor anggaran Rp 662.432.271.060,00.

"Sampai saat ini bantuan hibah yang terealisasi sudah 897 proposal," ujarnya, Kamis (26/7).

Suyasa menjelaskan, bantuan hibah ini diberikan berdasarkan usulan masyarakat dan kelompok/anggota masyarakat dalam bentuk proposal. Nah, proposal kemudian

Edisi : Jumat, 27 Juli 2018

Hal : 2



diverifikasi oleh tim. "Bantuan ini sudah berdasarkan by name dan by address. Penggunaannya juga diawasi," jelasnya.

Seperti diketahui, selain kepada kelompok/anggota masyarakat, Pemkab Badung juga menggelontorkan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta. Nilainya sebesar Rp 51.660.781.350. Perinciannya sebagai berikut, dana pendamping BOS SD dan SMP swasta Rp 8.088.750.000, kepada KONI Rp 6.160.000.000, instansi vertikal (BNK) Rp 1.051.137.100, KNPI Kabupaten Badung Rp 150.000.000, BAPORKORPRI Rp 500.000.000, PMI Cabang Badung Rp 2.988.254.250, PHDI Cabang Badung Rp 979.330.000, BPN Kabupaten Badung Rp 14.507.710.000, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Rp 4.500.000.000, Belanja Ope-

rasional Penyelenggaraan PAUD Rp 8.787.600.000, dan PAUD Bernuansa Hindu Rp 3.948.000.000. Adapun keseluruhan dana hibah pada APBD induk 2018 sebesar Rp 714.093.052.410.

Disinggung bantuan hibah untuk kabupaten lain di Bali? Mantan Kabag Keuangan Setda Badung ini menyebut Pemkab Badung tetap mengalokasikan bantuan untuk kabupaten lain di Bali. "Tapi untuk enam kabupaten (Bangli, Klungkung, Karangasem, Tabanan, Buleleng, dan Jembaran) tidak ada hibah. Namun, bentuknya adalah BKK (Bantuan Keuangan Khusus)," ujar Suyasa.

Adapun anggaran untuk BKK di APBD perubahan 2018 dirancang sebesar Rp 139.657.070.487. "Namun peruntukannya belum ditetapkan. Karena belum ada proposal yang masuk," tandasnya. **asa**

Edisi : Jumat, 27 Juli 2018

Hal : 2



Sekda Kota Denpasar Sebut Pemkot Berpatokan pada MoU

DENPASAR, NusaBali

Sekda Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Iswara membenarkan Lapangan Lumintang adalah milik Pemkab Badung dan Pemprov Bali. Penataan yang dilakukan pihaknya selama ini berpatokan pada memorandum of understanding (MoU) yang sudah ditandatangani pihak pertama Bupati Badung dan pihak kedua Walikota Denpasar.

Di dalam MoU tersebut pada pasal 3 ayat 2 sub B menyatakan pihak kedua

(Pekot Denpasar) wajib untuk merawat, memelihara, dan menjaga keamanan tanah dan/atau gedung, kebersihan, keindahan keserasian. Dengan berpatokan pada isi MoU tersebut Pemkot Denpasar saat ini melakukan pemeliharaan dengan memperbaiki rumput, tatanan, dan fasilitas Lapangan Lumintang.

"Kami bukannya tidak mau meminta izin. Tetapi kami melakukan pemeliharaan itu berdasarkan MoU. Karena di dalam MoU jelas disebutkan pihak kedua atau Pemkot

Denpasar untuk memelihara dan merawat. Nah, yang kami lakukan saat ini ya itu melakukan pemeliharaan dan perawatan bukan mengubah fungsi," kata Rai Iswara saat dikonfirmasi, Rabu (25/7).

Untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pemkab Badung. Pihak Pemkab Badung yakni Sekda sudah berkomunikasi menyangkut penataan tersebut. Sekda Badung pun mengimbau kepada Pemkot Denpasar untuk bersurat ke Badung. Kalaupun tidak ber-

surat, Pemkot Denpasar cukup memakai pedoman MoU.

"Ya Sekda Badung (I Wayan Adi Arnawa, Red) juga sudah menghubungi saya menanyakan soal penataan itu. Kami sudah jelaskan dan itu juga masih dalam lingkup penataan bukan beralih fungsi. Kami disuruh bersurat. Kami juga sudah bersurat Senin (23/7) kemarin. Katanya sudah ada jawaban tapi saya belum terima surat balasannya hingga sekarang," tutur Rai Iswara.

Rai Iswara membantah penarikan alat berat dari

Lapangan Lumintang karena proyek dihentikan. Menurutnya karena sudah selesai melakukan penggemburan.

"Tidak ada itu (penarikan alat berat). Itu karena kami sudah selesai memakainya. Dan sekarang pengerjaannya masih berlanjut, tapi yang ringan-ringan saja di sebelah utara. Sekali lagi, lapangan itu masih tetap hanya diperbaiki agar lebih tertata dan bagus untuk masyarakat. Jika beralih fungsi, kami pasti akan melakukan pemberitahuan," tandasnya. **m**



Jadi Tersangka, Mantan Kelian Lod Peken Propam-kan Penyidik

DENPASAR, NusaBali

Tidak terima dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang sewa tanah Pura Dugul, Banjar Lod Peken, Keramas, Gianyar, mantan Kelian Banjar Lod Peken, I Nyoman Puja Waisnawa, 47 mengadukan kinerja penyidik Unit II Subdit IV Dit Reskrim ke Bid Propam Polda Bali pada, Senin (16/7) lalu.

Mantan Kelian Lod Peken, Waisnawa melalui kuasa hukumnya, I Wayan Sumardika mengatakan penetapan tersangka Kelian Lod Peken, Waisnawa dalam kasus dugaan penggelapan uang sewa pelaba pura ban-

yak kejanggalan. Apalagi kasus ini sudah sempat ditangani Unit I Subdit III Dit Reskrim Polda Bali dan dinyatakan tidak cukup bukti.

"Dalam gelar perkara 31 Oktober 2017 lalu, dinyatakan laporan ini tidak cukup bukti," tegasnya saat ditemui, Rabu (25/7). Bukannya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kasus ini malah dilimpahkan ke Unit II Subdit IV Dit Reskrim Polda Bali. Hasilnya, penyidik malah menjadikan Kelian Banjar Lod Peken, Waisnawa sebagai tersangka.

Atas penetapan tersangka

ini, pihaknya merasa penyidik tidak melakukan tugasnya secara profesional. "Kami sudah resmi melaporkan penyidik Bripka IGNA ke Propam Polda Bali dengan dugaan tidak menjalankan tugas secara profesional," lanjutnya.

Dijelaskan, kasus ini berawal saat krama Banjar Lod Peken menyepakati akan menyewakan tanah Pelaba Pura seluas 5.465 m2 seharga Rp 3 juta per m2. Melalui seorang makelar, I Gusti Putu Sarjana, tanah ini lalu ditawarkan ke PT Keramas Surfing Park yang akhirnya menyetujui harga sewa tersebut. "Tapi karena disepakati tidak memberikan fee ke peran-

tara, akhirnya fee perantara tersebut dibebankan ke pihak penyewa dan pihak banjar tetap menerima uang sewa penuh dari penyewa," jelas Sumardika.

Masalah muncul saat pembuatan akta di notaris. Karena PT Keramas Surfing Park merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) maka dalam akta harga sewa per m2 digabung dengan fee yang akan diterima perantara. "Dalam akta tertuang sewa Rp 3.300.000 pertahun/m2. Atas akta ini Kelian Lod Peken yang menjadi perantara disebut menggelapkan uang Rp 300 ribu pertahun/

m2 dengan total Rp 413 juta. Padahal sesuai kesepakatan banjar sudah mendapatkan uang sewa penuh," bebarnya.

Sumardika menegaskan sangat keberatan dengan penetapan tersangka kliennya. "Oleh karenanya, kuat dugaan penyidik tidak melakukan tugasnya secara profesional dan kami memohon kepada Bid Propam untuk memeriksa teradu melalui mekanisme yang berlaku," pungkasnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja yang dikonfirmasi terkait laporan ke Bid Propam ini belum memberikan jawaban. **rez**

Edisi : Kamis, 26 Juli 2018

Hal : 5

BPK Perwakilan Bali Tunjuk Pemkot Denpasar

★ Lakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Dana Desa dan Pengelolaan Sampah



• IST
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat bertatap muka dengan Plt Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Bali IGN Satria Perwira di Kantor Walikota Denpasar Rabu (25/7).

DENPASAR, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali menunjuk Pemkot Denpasar sebagai lokasi dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kinerja dana desa dan pengelolaan sampah. "Pemerintahan Desa di Kota Denpasar telah mengalami pengajuan, sehingga BPK RI Perwakilan Bali menunjuk Pemkot Denpasar dalam pemeriksaan pendahuluan kinerja dana desa, serta juga melihat pengelolaan sampah," ujar Plt Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Bali IGN Satria Perwira saat bertatap muka dengan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara di Kantor Walikota Denpasar Rabu (25/7).

Lebih lanjut Satria Perwira men-

gatakan, pihaknya akan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015- tahun 2018 Semester I. Serta Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan tahun 2016-2018 semester I. Dari pemeriksaan pendahuluan ini pihaknya juga telah mengambil sample dan terbukti bahwa desa yang ada di Kota Denpasar memang sangat maju. "Dari sampel yang diambil adalah desa yang baru, maju dan berkembang. Dari hasil sample maka dipilihlah Kota Denpasar," ujarnya. Selain itu Pemerintah Kota Denpasar dalam mengelola keuangan terbukti sangat baik, sehingga berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak enam kali.

Tidak hanya itu, Kota Denpasar dipilih dalam Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Sampah Perkotaan karena Denpasar memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPA) seperti di Suwung. Dimana sampah yang datang juga dari berbagai daerah yang ada di Bali. Dalam pemeriksaan ini ia berharap agar instansi terkait dapat memberikan penjelasan secara detail, karena pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan keuangan yang lainnya. Dengan ini ia berharap agar ada nilai kemanfaatan dari Pemeriksaan Pendahuluan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa maupun kinerja persampahan.

Sementara Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menyambut baik dan pemeriksaan ini dapat sebagai langkah evaluasi di masing-masing Aparatur Sipil Negara. Mengingat Walikota Denpasar menerapkan moto Sewaka Dharma yakni melayani adalah kewajiban, dengan kinerja ASN serta sumber daya manusia aparaturnya dapat terus ditingkatkan. Disamping itu pihaknya juga menetapkan agar ASN memiliki ketelitian, ketepatan dan kecepatan dalam mengelola anggaran Desa.

Lebih lanjut Rai Iswara mengatakan, Kota Denpasar telah memiliki program pengelolaan sampah terpadu dari tingkat desa, kecamatan hingga kota. Sedangkan terkait dengan keberadaan untuk TPA Suwung wilayahnya memang berada di Kota Denpasar, namun pengelolaannya melalui Sarbagita. "Maka untuk menilai ketelitian, ketepatan dan kecepatan itu maka saya sambut baik pihak BPK agar dapat mengevaluasi program-program yang ada," ujarnya. @ m

Edisi : Kamis, 26 Juli 2018

Hal : 3



Kredit Macet dari Dana Bergulir Masih Tersisa Sekitar Rp 500 Juta

MANGUPURA, NusaBali

Dana bergulir yang dikucurkan Pemkab Badung melalui Koperasi Jagadhita senilai Rp 9 miliar menyisakan persoalan. Sejak temuan BPK tahun 2012 silam, banyak koperasi alami kredit macet hingga sekarang dana bergulir yang belum masuk ke kas daerah tercatat sekitar Rp 500-an juta.

"Tapi kami akan tetap monitoring kepada yang meminjam, karena sesuai saran dari BPK dana itu harus kembali ke kas daerah," tegas Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan Perizinan Simpan Pinjam pada Bidang Bina Usaha Koperasi Gusti Nyoman Rasmawan, saat mendampingi Kabid UKM Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung Gusti Ayu Suwartini, saat memberikan keterangan pers, Rabu (25/7), di Puspem Badung. Turut hadir

Kabag Humas Setda Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Dikatakannya, sebetulnya ada 24 koperasi yang bermasalah hingga alami kredit macet mencapai Rp 1,9 miliar. Namun, berkat upaya yang dilakukan Pemkab Badung, 16 koperasi akhirnya mengembalikan dana yang dipinjamnya. Kini masih tersisa sekitar Rp 500-an juta dari 8 koperasi yang sudah tak lagi beroperasi. "Walaupun koperasinya sudah tidak berjalan, kami akan terus kejar itu. Karena itu adalah uang kas daerah," tegasnya.

Menyusul temuan itu, untuk sementara bantuan dana bergulir terhadap koperasi dan UMKM di Badung dihentikan. "Iya, pada prinsipnya tidak digulirkan lagi," katanya.

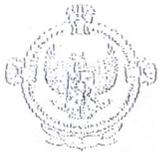
Seperti diketahui, dalam upaya mendorong koperasi semakin maju dan memiliki daya saing, sejak 2004 digulirkan dana bergulir. Nilainya

mencapai Rp 9 miliar. Namun, akhirnya bantuan tersebut dihentikan total tahun 2012 karena hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa dana bergulir yang dikelola oleh Koperasi Jagadhita bermasalah. Pertama, BPK menemukan pemberian dana bergulir ini tidak memiliki payung hukum yang jelas. Pemberian dana bergulir hanya berdasarkan peraturan bupati tanpa ada Perda. BPK juga melihat jangka waktu pengembalian dana tersebut ke kas daerah tidak jelas. Alasan inilah sehingga dana bergulir dihentikan sementara.

Tak hanya persoalan itu, BPK juga menemukan ada banyak koperasi alami kredit macet. Nah, atas saran dari BPK, pemerintah sampai sekarang terus mengejar pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan dana yang dipinjam ke kas daerah. **asa**

Edisi : Kamis, 26 Juli 2018

Hal : 2



✓ DPRD Diingatkan Syarat Pencairan Hibah Bansos

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kembali mengingatkan proses pencairan dana hibah bansos bagi kalangan anggota DPRD setempat. Langkah ini guna menghindari tudingan, keterlambatan pencairan dana hibah bansos ada di eksekutif.

Proses pencairan hibah bansos itu disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat dengan unsur pimpinan DPRD Buleleng, Selasa (24/7), di ruang Ketua Dewan. Rapat tersebut membahas persiapan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafo-nAnggaran Sementara (PPAS) untuk APBD tahun 2019.

Usai pertemuan, Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka, mengatakan, pertemuan hanya bersifat penyampaian informasi perkembangan dan penyusunan APBD 2019.

Mengingat dalam waktu dekat ini pemerintah sudah harus mengajukan Rancangan APBD 2019. Selain itu pada tahun 2019 mendatang diprediksi ada pengetatan rambu-rambu penggunaan anggaran, mengingat tahun 2019 merupakan tahun politik. "Meski akan tetap ada usulan hibah bansos, agar tetap berpedoman ada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Khususnya menyikapi tahun politik 2019," kata Puspaka.

Khusus untuk hibah bansos pada tahun 2019 mendatang, pemerintah meminta agar proposal sudah diajukan pada tahun ini juga. Sehingga pemerintah sudah bisa menyusun anggaran yang dibutuhkan. Selain itu proses pencairan juga dapat dilakukan dalam waktu singkat. Bahkan jika dimungkinkan, pencairan akan dilakukan pada awal tahun. "Pokoknya cepat selesaikan

administrasi di awal. Sepanjang pengesahan APBD sudah dilakukan, penjabaran sudah dilakukan, lalu (hibah) sudah terprogram, ngapain kita menunda-nunda. Makin cepat makin bagus," tegas Puspaka.

Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna enggan bicara banyak terkait pertemuan tersebut. Pihaknya akan mematuhi semua mekanisme dan aturan yang ada. "Hanya pertemuan biasa sebelum membahas KUA-PPAS. Tidak ada yang gawat," kata Supriatna.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran hibah bansos bagi anggota DPRD Buleleng cukup tinggi. Pada tahun 2018, anggaran hibah bansos mencapai Rp 45 miliar. Apabila dirata-ratakan, masing-masing anggota dewan mendapat jatah hibah bansos sebesar Rp 1 miliar per tahun. **k19**



Nihil Kerugian Negara, Kasus Distop

Dugaan Korupsi Kredit Investasi Rp 200 M di BPD Bali

Setelah dilakukan gelar perkara dengan dua temuan bukti baru tersebut, penyidik akhirnya memutuskan menghentikan penyidikan

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali akhirnya resmi menghentikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit investasi di Bank Pembangunan Daerah

(BPD) Bali senilai Rp 200 miliar. Penyidik menyatakan tidak menemukan kerugian negara dalam kredit investasi tersebut.

Hal ini diungkapkan Kajati Bali, Amir Yanto saat jumpa pers Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 di Kejati Bali, Senin (23/7). Ia menegaskan bahwa kasus BPD Bali sudah dihentikan. Alasan secara umum, karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya nilai kerugian negara yang diperkuat dengan keterangan ahli. "Hasil perhitungan ahli bahwa agunan yang diberikan sudah melebihi dari nilai kredit. Sehingga menurut ahli, itu tidak ada kerugian Negara," tegas Amir Yanto.

Aspidsus Kejati Bali, Polin O Sitanggang mengatakan keputusan untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara dugaan korupsi investasi di BPD Bali sudah melalui tahapan di penyidikan. Diakui, awalnya memang penyidik sempat menyatakan menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan. Penyidik juga mengklaim sudah mengantongi dua alat bukti dan 5 calon tersangka dalam perkara ini.

Namun setelah didalami, penyidik tidak menemukan kerugian negara. Terhadap dua alat bukti di antaranya agunan yang awalnya tanah sewa belakangan diketahui jika status tanah

tersebut adalah HGB (Hak Guna Bangunan). "Awalnya memang ada selentingan tanah yang diajukan agunannya untuk kredit Rp 150 miliar tersebut statusnya hak sewa dan itu jelas konyol dan bunuh diri. Setelah diperdalam lagi, ternyata HGB (Hak Guna Bangunan) dan nilainya di atas plafon pinjaman," terangnya sambil menambahkan jika saat itu objek agunan Hotel Sovereign Bali sudah dikuasai kurator.

Setelah dilakukan gelar perkara dengan dua temuan bukti baru tersebut, penyidik akhirnya memutuskan menghentikan penyidikan karena tidak adanya kerugian negara dalam perkara

ini. "Tapi jika nanti di kemudian hari ditemukan bukti baru yang mengarah ke korupsi, perkara ini bisa dibuka kembali," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, penyidik telah memanggil serta memeriksa mantan direktur utama (Dirut) BPD Bali berinisial MS. Pemanggilan mantan pejabat utama BPD Bali itu, terkait pemberian serta pencairan dana kredit kepada dua kreditur atau perusahaan.

Dua perusahaan itu adalah PT Karya Utama Putera Pratama dengan nilai kredit investasi sebesar Rp 150 miliar. Sedangkan PT Hakadikon Beton Pratama telah mendapatkan dana kredit senilai Rp 42 miliar. rez

Edisi : Selasa, 24 Juli 2018

Hal : 5